

**HALAQAH SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN POLITIK KADER PARTAI  
(Studi Pada Kader Perempuan SANTIKA Dewan Pengurus Daerah Partai  
Keadilan Sejahtera Kota Surakarta)<sup>1</sup>**

Oleh :

Sinta, Rima Vien PH & Moh. Muchtarom<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The purposes of this study are to find out: (1) Have the implementation of halaqah onto women cadre of SANTIKA on the Prosperous Justice Party's (PKS) Surakarta Branch already reach an ideality, (2) The effectiveness of halaqah in forming political participation of women cadre of SANTIKA on the Prosperous Justice Party's (PKS) Surakarta Branch, (3) The inhibiting factors of halaqah in forming political participation of women cadre of SANTIKA on the Prosperous Justice Party's (PKS) Surakarta Branch. This study employs used a qualitative method. a single strategy stuck is used in this study. The sources of data were obtained from informants, the involving places, events and documents. This study uses purposive sampling technique. The technique of collecting data to obtain and compile research data was through observation, interviews and document analysis. To obtain the validity of the data, the triangulation of data and triangulation of methods were utilized. While, the model interactive analysis technique. Based on the results of the study, it can be concluded that: (1) The implementation of halaqah onto women cadre of SANTIKA on the Prosperous Justice Party's (PKS) Surakarta Branch has not been fully entirely ideal yet, (2) The effectiveness of halaqah has not been fully effective yet in forming political participation of women cadre of SANTIKA on the Prosperous Justice Party's (PKS) Surakarta Branch, it can be seen from the indicators of input, process, output, and outcome that are mostly not in accordance with what is expected, (3)The inhibiting factorsof halaqah in forming political participation of women cadre of SANTIKA on the Prosperous Justice Party's (PKS) Surakarta Branch are: (a) The halaqah is lack of ideality, (b) The cadres lack in understanding and priority, The lack competence of the murabbiah (the woman leader of the halaqah), the lack of party control mechanisms, (c) Unsupported by surroundings.*

**KATA KUNCI:** *Halaqah, Pendidikan Politik, Partai Keadilan Sejahtera*

---

<sup>1</sup> Artikel Penelitian

<sup>2</sup> Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

## PENDAHULUAN

Politik merupakan hal yang sangat terkait dengan kehidupan pemerintahan suatu negara. Permasalahan politik juga kerap menjadi perbincangan dalam diskusi-diskusi terbuka maupun pemberitaan yang menarik di media massa. Terdapat tema penting jika kita berbicara dan membahas tentang masalah politik, yaitu pendidikan politik, kesadaran politik dan partisipasi politik. Sekarang ini, pendidikan politik masih sering dipertanyakan pelaksanaannya maupun tingkat keefektivasannya, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga formal, informal maupun non formal. Cahyadi Takariawan (2003:108) menyebutkan "Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pendidikan sosial dan politik adalah keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan seperti sekolah, kampus maupun pesantren, partai politik, organisasi massa juga lembaga swadaya masyarakat pada umumnya". Jadi, salah satu lembaga yang harus berperan dalam melakukan pendidikan politik adalah partai politik.

Permasalahannya, sekarang ini banyak partai politik yang kurang memperhatikan peran dan fungsinya dalam melakukan pendidikan politik tersebut. Sejauh ini, masih banyak partai politik yang hanya melakukan mobilisasi politik dan cenderung menempatkan partainya sebagai alat

pencari kekuasaan. Partai politik justru mengabaikan peran dan fungsi substansialnya dalam melakukan pendidikan politik terhadap kader maupun masyarakat, termasuk terhadap perempuan. Padahal di sisi lain, pendidikan politik terhadap kader menjadi hal yang seharusnya dilakukan oleh partai politik. Kader adalah orang yang bekerja dan bergerak dalam partai dan sudah semestinya mereka mempunyai kematangan dalam segi konsep, nilai, maupun partisipasi politik yang cerdas, apalagi kader perempuan yang tidak bisa terlepas dari perannya sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, kader-kader baik laki-laki maupun perempuan juga harus mampu menjadi *stakeholder* dalam melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, baik melalui program partainya maupun dengan strategi mereka secara personal.

Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 31 ayat (1), telah disebutkan bahwa tujuan pendidikan politik salah satunya adalah meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, tujuan pendidikan politik salah satunya adalah meningkatkan partisipasi politik, dengan tetap memperhatikan keadilan dan kesejahteraan gender. Hal tersebut akan menjadi hal yang lebih penting lagi, apabila perempuan

tersebut merupakan seorang kader partai politik yang dituntut untuk lebih paham mengenai kehidupan berpolitik. Sehingga, mereka akan mampu mengoptimalkan peran politiknya dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat sejalan dengan konsep pembentukan warga negara yang baik. Di mana, konsep tersebut sangat terkait dan tidak dapat terlepas dari tiga komponen penting yang sudah semestinya dimiliki oleh seorang warga negara. Komponen tersebut yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*).

Partai Keadilan Sejahtera sejauh ini telah mempunyai program-program dalam melakukan pendidikan politik bagi kadernya, termasuk terhadap kader perempuannya. Pada Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta, format pendidikan politik yang sudah pasti diikuti oleh semua kader dan yang menjadi inti dari proses pendidikan politik bagi kadernya, baik kader perempuan maupun kader laki-laki adalah *halaqah*. Di mana dalam *halaqah* ini dilakukan pembinaan dan pembentukan karakter kader, serta fokus pembinaan dilakukan dengan proses internalisasi nilai-nilai keislaman dalam setiap sisi kehidupan kader, termasuk

kehidupan politik mereka. Namun, walaupun demikian partisipasi politik kader masih bisa dikatakan kurang, khususnya pada kader perempuan yang tergabung dalam SANTIKA (Barisan Putri Keadilan).

Hal tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi masalah penelitian dan pada akhirnya didapatkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan *halaqah* kader perempuan SANTIKA (Barisan Putri Keadilan) pada Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta, mengetahui tingkat efektivitas *halaqah* dalam membentuk partisipasi politik kader perempuan SANTIKA (Barisan Putri Keadilan) pada Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta, mengetahui faktor penghambat *halaqah* dalam membentuk partisipasi politik kader perempuan SANTIKA (Barisan Putri Keadilan) pada Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini peneliti mengambil lokasi tempat penelitian di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta dengan alamat Jl. Slamet Riyadi No. 634B, Kerten, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan *Halaqah* merupakan pola dan sistem pendidikan politik yang unik dan khas yang digunakan

Partai Keadilan Sejahtera sebagai salah satu sarana pendidikan politik terhadap kadernya, termasuk kader perempuan SANTIKA Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Strategi penelitian yang digunakan menggunakan strategi tunggal terpancang. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan observasi, wawancara serta analisis dokumen. Untuk memperoleh validitas data digunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, (4) Pengambilan Kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Tahap Pra Penelitian, (2) Tahap Pengumpulan Data, (3) Tahap Analisis Data, (4) Tahap Penyusunan Laporan Penelitian.

## PEMBAHASAN

Salah satu inti pendidikan politik terhadap kader Partai Keadilan Sejahtera adalah melalui kegiatan *halaqah*. Dalam

pelaksanannya, *halaqah* merupakan kegiatan yang wajib dan pasti diikuti oleh setiap kader, termasuk kader perempuan yang tergabung dalam Barisan Putri Keadilan (SANTIKA). Beberapa hal penting terkait pelaksanaan *halaqah* kader SANTIKA, antara lain dapat dijabarkan dalam tujuan *halaqah*, rukun *halaqah*, komponen *halaqah*.

Tujuan *halaqah* sebagai pendidikan politik adalah memberikan pemahaman konsep politik, orientasi politik dan pengalaman politik yang diharapkan mampu membentuk kedewasaan politik kader. Sehingga pada akhirnya memunculkan partisipasi politik yang berorientasi *dakwah*. Hal tersebut di atas relevan dengan pendapat Sulaiman Al-Khumaisi tentang tujuan pendidikan politik yang menyebutkan bahwa "Pendidikan Politik bukan sekedar pelatihan kewarganegaraan pemuda dalam sistem politik, akan tetapi disamping itu juga berarti pembentukan sejumlah orientasi, model-model, perilaku, dan loyalitas pada diri pemuda" (Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, 2000: 83). Rukun *Halaqah*. Rukun-rukun yang dikembangkan dalam *halaqah* Partai Keadilan Sejahtera juga mengadopsi rukun *halaqah* dalam Ikhwanul Muslimin. Rukun-rukun tersebut adalah *taaruf*, *tafahum*, *takaful*. Kegiatan *halaqah*, dalam pelaksanaannya, mempunyai beberapa komponen. Komponen

tersebut adalah *Murabbiah/guru, Mutarabbi/anggota, Waktu dan Tempat Halaqah, Kurikulum Halaqah, Prasarana Halaqah, Baramij Halaqah.*

Dalam pelaksanaannya, *halaqah* kader perempuan SANTIKA Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Surakarta dapat dikatakan belum ideal. Satria Hadi Lubis (2010: 58) menguraikan bahwa ciri-ciri *halaqah/usrah* yang dinamis adalah adanya suasana yang inovatif, komentar-komentar kerinduan, ingin berlama-lama, kehadiran yang rutin. Masih banyak hal yang belum menggambarkan ciri-ciri *halaqah yang dinamis* dan juga belum sesuai harapan partai. Banyak hal-hal yang masih perlu ditingkatkan dan dievaluasi agar pelaksanaan *halaqah* lebih dinamis dan produktif.

Selanjutnya pendidikan politik melalui *halaqah* dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dalam membentuk partisipasi politik kader perempuan SANTIKA Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta meskipun terdapat beberapa hal positif yang sudah diberikan terhadap kader. Hal tersebut dapat diukur melalui indikator *input, process, output,* maupun *outcome.* E. Mulyasa (2005:85) menjelaskan bahwa untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan

indikator *input, process, output, outcome.*

Efektivitas *halaqah* dalam membentuk partisipasi politik kader perempuan Barisan Putri Keadilan (SANTIKA) Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta berdasarkan indikator *input,* dapat dilihat bahwa dalam *halaqah* kader perempuan SANTIKA Dewan Pemimpin Daerah Kota Surakarta, *murabbiah* belum mampu memaksimalkan perannya untuk memotivasi, mengarahkan, membimbing dan mengendalikan perjalanan *halaqah* secara ideal. Fasilitas dan perlengkapan masih kurang memenuhi keperluan yang seharusnya. Selanjutnya materi *halaqah* belum disampaikan secara terprogram dan rinci, serta tidak semua diberikan melalui *halaqah* saja. Sehingga hal tersebut membuat proses pendidikan politik melalui *halaqah* kurang efektif.

Kemudian di lihat dari indikator *process,* secara garis besar dapat disimpulkan bahwa *murabbiah* kurang mampu memaksimalkan peran administratif sebagai guru pendidikan politik. Hal tersebut terkait peran sebagai motivator politik yang belum secara maksimal dilakukan. Kemudian mengenai penggunaan metode pembelajaran yang kurang variatif serta *managemen* waktu *halaqah* yang kurang optimal. Sehingga mengakibatkan tujuan pendidikan

politik melalui *halaqah* juga belum sepenuhnya tercapai secara efektif.

Selanjutnya pada indikator *output*, hasil-hasil belajar kader perempuan SANTIKA melalui *halaqah* kurang mampu terukur secara pasti baik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan sikap politik kader setelah mengikuti *halaqah* belum seperti apa yang diharapkan. Ahmad Dzakirin (2011: 24) mengatakan bahwa "Pendidikan politik dimaksudkan sebagai upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka membentuk kepribadian politik yang dikehendaki melalui terbentuknya orientasi dan sensitivitas politik para anggota sehingga menjadi partisipan aktif dalam kehidupan politik keseharian mereka". Namun sebagian besar kader perempuan SANTIKA belum memiliki pengetahuan, wawasan dan perasaan politik yang kuat serta belum memiliki orientasi sikap yang menunjukkan kecenderungan untuk aktif berpolitik. Namun di sisi lain pembinaan, pengarahan, motivasi maupun penugasan antar kader berbeda, disesuaikan dengan pemahaman dan kebutuhan kader yang bersangkutan. hal tersebut tentu masih jauh dengan harapan partai.

Sedangkan berdasarkan indikator *outcome*, bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan kader perempuan SANTIKA masih

sebatas aksi dan pemilu. Bahkan masih terdapat kader yang *golput*. Partisipasi politik aktif merupakan target akhir dalam proses pendidikan politik. Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh kader perempuan SANTIKA dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi mereka masih sebatas pada tingkatan partisipasi politik kelompok pemikir, penonton dan pengamat politik. Di mana menurut sebagian besar peneliti dalam Abdul Mu'iz Ruslan (2000:104) menjelaskan bahwa "Kelompok pemikir yaitu mereka yang memberikan perhatian kepada penelitian dan bergulat dengan informasi politik, setelah itu memberi suara". Selain itu menurut pendapat Milbarth, kegiatan politik yang dilakukan oleh kader perempuan SANTIKA dapat dikategorikan dalam kegiatan-kegiatan yang mendekati sebagai penonton (*Spectator Activities*). Di mana menurut Milbarth dalam AA Said Gatara dan Dzulkiah Saiad (2007: 96) mengkategorikan bahwa kegiatan-kegiatan sebagai penonton (*Spectator Activities*) adalah "*Waering a button or putting a sticker on one's car, Attempting to talk another into voting a certain way, Initiating a political discussion, Voting, Exposing oneself to political stimuli*". Selanjutnya apabila kita melihat kategori partisipasi politik menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson, partisipasi yang dilakukan

oleh kader perempuan SANTIKA dapat digolongkan dalam kategori yang mendekati kategori sebagai pengamat. Di mana menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson dalam Syahrial Syarbaini, dkk, (2002: 70) menyebutkan kegiatan pengamat adalah "Menghadiri rapat umum, anggota partai/kelompok kepentingan, usaha meyakinkan orang, memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik". Berdasarkan tingkatan partisipasi politik, kelompok pemikir, dan penonton serta pengamat merupakan bentuk partisipasi yang berada dalam tingkatan bagian bawah. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat partisipasi model tersebut masih dikategorikan rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi yang dilakukan oleh sebagian besar kader perempuan SANTIKA masih rendah.

Faktor penghambat partisipasi politik erat kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi pendidikan politik yang dilakukan. Abdul Mu'iz Ruslan (2000:101-103) menyebutkan faktor yang berpengaruh dalam proses pendidikan politik, yaitu: "Keyakinan agama yang diimani oleh individu, jenis kultur politik atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan politik yang mempengaruhinya, karakter lingkungan politik, faktor-

faktor personal". Faktor yang berpengaruh dalam pendidikan politik tersebut dapat sekaligus menjadi faktor penghambat partisipasi politik. Seperti halnya yang terjadi pada kader perempuan SANTIKA Dewan Pimpinan Daerah Kota Surakarta. Di mana faktor penghambat *halaqah* dalam membentuk partisipasi politik mereka yang pertama, kurangnya pemahaman kader terhadap tujuan *halaqah* sebagai pendidikan politik dan partisipasi politik belum menjadi prioritas utama bagi kader. Kedua, peran *murabbiah* yang kurang maksimal dalam mendorong kader perempuan SANTIKA untuk melakukan partisipasi politik secara aktif. Ketiga, *halaqah* yang kurang ideal. Keempat, mekanisme kontrol partai yang belum maksimal terkait sistem *halaqah* dan *mutasi*. Kelima, yaitu lingkungan keluarga yang kurang mendukung maupun persepsi masyarakat yang masih negatif terhadap perempuan yang berkiprah dalam politik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan *Halaqah* kader perempuan SANTIKA Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta kurang ideal (2) Pendidikan politik melalui *halaqah* dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dalam

membentuk partisipasi politik kader perempuan SANTIKA Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta, hal tersebut dapat dilihat dari indikator *input, process, output, dan outcome* yang sebagian belum sesuai dengan apa yang diharapkan. (3) Faktor penghambat *halaqah* dalam membentuk partisipasi politik kader perempuan SANTIKA Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta adalah (a) *Halaqah* kurang ideal (b) Kurangnya pemahaman dan prioritas kader, (c) Kurangnya kompetensi *murabbiah*, (d) Kurangnya mekanisme kontrol partai, (e) Lingkungan kurang mendukung.

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, maka peneliti dapat mengemukakan saran bagi DPD PKS Kota Surakarta antara lain yaitu: (1) Partai melalui bidang kaderisasi, sebaiknya meningkatkan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan *halaqah* kader perempuan SANTIKA melalui pertemuan yang intens dengan *murabbiah* untuk melakukan evaluasi serta melakukan upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masing-masing *halaqah*, (2) Mengingat *halaqah* merupakan inti pendidikan politik kader, sebaiknya dalam *halaqah* perlu ditambahkan materi-materi dengan pokok bahasan politik yang lebih banyak, tanpa mengurangi materi keislaman

maupun *ketarbiyahan*, (3) Hendaknya partai memberi fasilitas berupa buku pedoman untuk *murabbiah* maupun *mutarabbi* yang digunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan *halaqah*. Selain itu, partai perlu mengadakan forum diskusi politik, pelatihan maupun seminar-seminar bertema politik secara intens khusus untuk kader SANTIKA sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta peran aktif kader dalam agenda-agenda kepartaian maupun politik praktis.

Kemudian bagi *Murabbiah* antara lain yaitu: (1) Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok *halaqah* dan mengambil peran yang kuat sebagai motivator politik terhadap kader perempuan SANTIKA, (2) Melakukan persiapan yang matang dalam pembelajaran *halaqah* dengan membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran serta berupaya mengembangkan metode pembelajaran dengan lebih bervariasi, sehingga *halaqah* menjadi produktif dan dinamis, (3) Mengembangkan materi *halaqah* dengan menambahkan pembahasan yang bermuatan politik serta memantau secara nyata partisipasi politik yang dilakukan oleh kader perempuan SANTIKA baik secara individu maupun kolektif dengan selalu melakukan evaluasi maupun mengupayakan keaktifan partisipasi politik kader.

Bagi kader perempuan SANTIKA DPD PKS kota Surakarta adalah sebagai berikut (1) Hendaknya berusaha menjadikan kelompok *halaqahnya* sebagai *halaqah* yang ideal serta mampu bersikap kritis terhadap pelaksanaan *halaqah*, (2) Sebaiknya lebih meningkatkan kepekaan, kepedulian, keesaan serta partisipasi politik dengan mengikuti perkembangan berita politik, mendatangi seminar-seminar politik, melakukan diskusi-diskusi politik baik formal maupun informal serta memberikan kontribusi yang nyata dalam berbagai kegiatan politik berupa perbaikan lingkungan maupun pelayanan masyarakat, (3) Alangkah baiknya sebagai kader perempuan SANTIKA menjadikan partisipasi politik sebagai sebuah prioritas yang harus dilakukan dengan misi *dakwah* maupun perbaikan umat.

Bagi masyarakat, penulis menyarankan sebagai berikut: (1) Persepsi negatif dalam masyarakat yang masih menganggap perempuan tidak terlalu penting melakukan partisipasi politik, seharusnya diubah. Justru perempuan harus mampu memaksimalkan peran mereka dalam memberikan pengaruh terkait kebijakan-kebijakan yang menyangkut perempuan, (2) Hendaknya masyarakat mampu memberikan respon positif dan mendukung kader perempuan yang aktif berpolitik selama apa yang

diperjuangkan adalah sesuatu yang mengandung nilai kebaikan, utamanya bagi perempuan secara umum, (3) Masyarakat perlu melakukan evaluasi maupun bersikap kritis terhadap partisipasi politik yang dilakukan oleh kader perempuan SANTIKA.

Sedangkan bagi keluarga, penulis menyarankan sebagai berikut: (1) Sebaiknya keluarga memberikan motivasi kepada anggota keluarganya yang menjadi kader perempuan SANTIKA untuk melakukan partisipasi politik secara lebih aktif, (2) Hendaknya keluarga mampu memberi dukungan terhadap aktivitas-aktivitas politik yang sudah dilakukan kader perempuan SANTIKA, (3) Memantau partisipasi politik yang dilakukan kader perempuan SANTIKA serta ikut mengambil peran dalam partisipasi politik secara aktif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A.A. Sahid Gatra dan Moh. Dzulkiah Said. 2007. *Sosiologi Politik : Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung : Pustaka Setia.
- Ahmad Dzakirin. 2011. *Tarbiyah Siyasiah*. Solo : Era Media.
- Cahyadi Takariawan. 2003. *Fikih Politik Perempuan*. Surakarta: Era Intermedia.
- E. Mulyasa. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep Strategi dan Implementasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Satria Hadi Lubis. 2003. *Solusi Jitu Problematika Halaqoh: 77 Problematika Aktual Halaqoh Jilid II*. Jakarta: Misykat Publication.
- Syahrial Syarbaini,dkk, 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utsman Abdul Mu'iz Ruslan. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin (Studi Analisis Evaluatif Terhadap Proses Pendidikan Politik "Ikhwan" untuk para Anggota Khususnya, dan Seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari Tahun 1928 hingga 1954)*, Solo : Era Media.